

DINAMIKA MALHIKDUWA



**EDISI
KHUSUS**

HARI KESAKTIAN PANCASILA

DINAMIKA MALHIKDUWA



Ket. Monumen Pancasila Sakti

KAJI HISTORI SEJARAH PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA

Penulis : Isnan Chodri, S.Pd

Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri / Panglima Angkatan Darat Jenderal Soeharto pada tanggal 17 September 1966. Surat itu menyatakan bahwa Hari Kesaktian Pancasila wajib dilakukan oleh seluruh pasukan AD dengan mengikutsertakan angkatan lainnya sekaligus masyarakat. Perayaan Hari Kesaktian Pancasila kali pertama dilaksanakan di Lubang Buaya, Jakarta, pada 1 Oktober 1966.

Sejarah Hari Kesaktian Pancasila sangat erat hubungannya dengan peristiwa



Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada malam hari tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965.

Hal inilah yang kemudian sempat menimbulkan beragam pertanyaan, mengapa Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada 1 Oktober, ketika peristiwa pembunuhan enam jenderal dan satu perwira TNI terjadi. Tragedi G30S adalah sebuah kisah kelam bangsa Indonesia.

Adapun PKI (Partai Komunis Indonesia) dituding menjadi dalang di balik peristiwa penculikan dan

pembunuhan ketujuh korban TNI Angkatan Darat.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya G30S/PKI adalah tuduhan bahwa sejumlah jenderal Angkatan Darat hendak melakukan kudeta terhadap kepemimpinan sah Presiden Soekarno pada 5 Oktober 1965.

Oleh karena itu, PKI disebut menangkap dan membunuh tujuh tokoh yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Sekarang, ketujuh korban dalam G30S sudah dinobatkan sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia.

Tujuh korban G30S/PKI adalah:

Jenderal Ahmad Yani
Mayjen R. Soepranto
Mayjen M.T. Haryono
Mayjen S Parman
Brigjen DI Panjaitan
Brigjen Sutoyo
Lettu Pierre A Tendean

Selain dituduh sebagai pelaku di balik G30S, PKI juga dituding hendak mengubah ideologi Pancasila dengan komunisme.

Untuk mengenang kegagalan G30S dan tewasnya ketujuh korban, pada masa pemerintahan Orde Baru, dikeluarkan Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tanggal 17 September 1966 atau Kep 977/9/1966, yang menetapkan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Makna Hari Kesaktian Pancasila adalah sebagai penghormatan terhadap seluruh pahlawan yang gugur. Mengingat kembali perjuangan para pahlawan Indonesia dalam menjaga Pancasila. Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila kali pertama dilaksanakan di Lubang Buaya, Jakarta, pada 1 Oktober 1966.

DINAMIKA MALHIKDUWA



Dari Perang Kemerdekaan hingga Operasi Damai Peran TNI dalam Sejarah Indonesia

Penulis : ZAHROTU ZITA

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kanvas perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional. Sebagai kekuatan yang baru lahir, disamping TNI menata dirinya, pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pepolit, Biro Perjuangan, dan TNI-Masyarakat. Sedangkan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan lebih modern.

Sadar akan keterbatasan TNI dalam menghadapi agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat

Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut.

Dengan demikian, integritas dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat.

Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan hal tersebut, dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. Kemudian APRIS pun berganti nama menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah internal TNI mendorong terjadinya Peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang turut serta sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Periode yang juga disebut Periode Demokrasi Liberal ini diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Azis, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Sementara itu, DI TII Jawa Barat melebarkan pengaruhnya ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pada tahun 1958 Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) melakukan pemberontakan di sebagian besar Sumatera dan Sulawesi Utara yang membahayakan integritas nasional. Semua pemberontakan itu dapat ditumpas oleh TNI bersama kekuatan komponen bangsa lainnya.

Upaya menyatukan organisasi angkatan perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republika

Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada dekade tahun enam puluhan. Menyatunya kekuatan Angkatan Bersenjata di bawah satu komando, diharapkan dapat mencapai efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan kelompok politik tertentu. Namun hal tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai bagian dari komunisme internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh Presiden/Panglima Tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya.

Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh G30S/PKI, mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta serta menumpas kekuatan pendukungnya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan masyarakat bahkan seluruh rakyat Indonesia.

Kini TNI harus menghadapi tantangan baru dalam menghadapi tugasnya. Berbagai tindak kejahatan mulai merasuk dalam tubuh rakyat Indonesia. Ancaman terorisme, penyebaran paham radikalisme, perubahan iklim yang



menyebabkan berbagai bencana alam, hingga kejahatan transnasional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan kejahatan siber menjadi tugas penting bagi TNI untuk menjaga kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TNI telah membuktikan diri sebagai institusi yang tangguh dan profesional dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Sejarah panjang perjuangan TNI menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus menjaga semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

DINAMIKA MALHIKDUWA



diperingati setiap tanggal **2 Oktober** sebagai bentuk penghormatan terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh **UNESCO** sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun **2009**. Pada hari ini, masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, termasuk para pejabat pemerintahan, pegawai negeri, dan masyarakat umum, dianjurkan untuk mengenakan batik sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya nasional.

SEJARAH PENETAPAN HARI BATIK NASIONAL

Batik telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Motif dan pola batik yang kaya memiliki nilai filosofis yang dalam, mencerminkan nilai-nilai luhur dan kebudayaan di berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal **2 Oktober 2009**, batik Indonesia secara resmi diakui oleh **United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)** sebagai **Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity**.

Pengakuan ini menjadi tonggak penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya. Pengakuan tersebut juga membawa batik ke tingkat internasional, memperkenalkan keindahan dan keunikan batik ke seluruh dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal **2 Oktober** sebagai Hari Batik Nasional sebagai wujud rasa syukur dan kebanggaan terhadap pengakuan dunia ini.

PERAN BATIK DALAM KEBUDAYAAN INDONESIA

Batik bukan hanya sekedar kain dengan corak yang indah, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam dari Setiap motif batik mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya daerah tertentu. Misalnya, batik dari Yogyakarta dan Solo

memiliki motif yang lebih formal dan dipengaruhi oleh tradisi kerajaan Jawa, sementara batik dari daerah pesisir seperti Pekalongan dan Cirebon yang lebih berwarna-warni dan dinamis, mencerminkan pengaruh budaya asing

Hari Batik Nasional

Penulis: firza azila fitri

yang masuk melalui jalur perdagangan.

Batik juga sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan acara penting, seperti halnya pernikahan, kelahiran, hingga kematian. Setiap jenis batik dipakai dalam kesempatan yang berbeda, yaitu menunjukkan status sosial atau makna spiritual tertentu.

DAMPAK PERINGATAN HARI BATIK NASIONAL

Peringatan Hari Batik Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya melestarikan batik sebagai warisan budaya. Di berbagai daerah, peringatan ini dirayakan dengan berbagai kegiatan, seperti pameran batik, lomba desain batik, seminar, dan parade busana. Kegiatan-kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi industri batik di Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun budaya.

Selain itu, peringatan ini juga mendorong generasi muda untuk lebih mencintai batik dan terlibat dalam proses kreatif pengembangan batik. Inovasi-inovasi dalam desain batik modern juga bermunculan, sehingga batik dapat terus relevan di kalangan masyarakat urban dan internasional.

BATIK DI KANCAH INTERNASIONAL

Seiring dengan pengakuan UNESCO, batik semakin

dikenal di dunia internasional. Banyak desainer lokal dan internasional yang mengadopsi motif batik dalam karya mereka, sehingga batik semakin diterima sebagai bagian dari tren mode global. Pemerintah Indonesia juga terus mempromosikan batik melalui berbagai acara internasional dan diplomasi budaya, memastikan bahwa batik terus dikenal dan dihargai sebagai salah satu warisan budaya terpenting Indonesia.



KESIMPULAN

Hari Batik Nasional adalah momen penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk merayakan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan filosofis. Dengan mengenakan batik, masyarakat turut serta dalam melestarikan identitas budaya bangsa dan memperkenalkannya ke dunia internasional.

DINAMIKA MALHIKDUWA

MENGENAL JENDERAL AHMAD YANI

Penulis : Zahwa Azizah



Lahir pada tanggal 19 juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah, Beliau menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat (setingkat KSAD) yang merupakan salah satu Pahlawan Revolusi yang gugur sebagai korban tragedi 30 September atau G30SPKI

PENDIDIKAN

Ahmad Yani menempuh pendidikan sekolah HIS



di Purworejo hanya sampai kelas I, ia pindah ke HIS Magelang sejak kelas II. Ahmad Yani menamatkan HIS pada 1935 di Bogor dan meneruskan hingga MULO. Ia pindah ke Jakarta untuk

menempuh sekolah AMS tapi terhenti karena perang dunia II.

PENDIDIKAN MILITER

Pada tahun 1940, Yani meninggalkan sekolah menengah untuk menjalani pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Sebagai calon perwira, ia mengambil kecabangan / bidang topografi militer di Malang, Jawa Timur, tetapi pendidikan ini terputus karena invasi Jepang pada tahun 1942. Di tahun yang sama,

Yani dan keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah.

JURUSELAMET MAGELANG

Setelah Kemerdekaan Indonesia, Yani bergabung dengan tentara republik yang baru terbentuk untuk berjuang melawan Belanda yang membonceng sekutu. Selama waktu bulan-bulan pertama setelah Proklamasi Kemerdekaan, Jenderal Yani memimpin batalion tentara dan menang dalam pertempuran melawan tentara Inggris di Magelang. Yani kemudian juga mempertahankan Magelang dari tentara Belanda dan mendapat julukan "Juruselamat Magelang".

PEMBERONTAKAN DARUL ISLAM INDONESIA,

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda tahun 1949, Yani pindah ke Tegal, Jawa Tengah. Pada tahun 1952, ia mendapatkan tugas untuk memadamkan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang ingin mendirikan negara agama berdasarkan syariat Islam di Indonesia.

Untuk menghadapi DI/TII, Yani membentuk pasukan khusus bernama Banteng Raiders. Dalam kurun waktu selama 3 tahun, pemberontakan DI/TII di Jawa Tengah berhasil dipadamkan Banteng Raiders juga berperan dalam hal lain, seperti memberantas PRRI, Permesta, dan serta pembebasan Irian Barat.

Pada Desember 1955, Yani



berangkat ke Amerika Serikat untuk belajar di Komando dan Staf Umum College, Fort Leavenworth, Kansas. Kembali pada tahun 1956, Yani dipindahkan ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta di mana ia menjadi anggota staf Umum untuk Abdul Haris Nasution. Di Markas Besar Angkatan Darat, Yani menjabat

sebagai Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat sebelum menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat untuk Organisasi dan Kepegawaian.

Pada bulan Agustus tahun 1958, ia memerintahkan Operasi 17 Agustus terhadap Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil merebut kembali Padang dan Bukittinggi, dan keberhasilan misi ini menyebabkan beliau dipromosikan menjadi wakil kepala Angkatan Darat ke-2 staf pada 1 September 1962, dan kemudian Kepala Angkatan Darat stafnya pada 28 Juni 1962 dan pada tanggal 21 Juli 1962 sebutan Kepala Staff Angkatan diubah menjadi Menteri/Panglima, sehingga diangkat menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.[1] Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai pendahulu Jenderal Yani diangkat menjadi Mengko hankam/KASAB - Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan / Kepala Staff Angkatan Bersenjata. Ahmad Yani memegang posisi ini hingga ia gugur dalam G30S.

Kolonel Yani memimpin BRIEFING pada 12 April 1958 (Umur 35) selama "Operasi 17 Agustus"

DINAMIKA MALHIKDUWA



Hari kesehatan mental pertama kali dirayakan pada tahun 1992, peringatan ini lahir dari inisiatif World Federation for Mental Health (WFMH), yang didirikan oleh Wakil **Sekretaris Jenderal Richard Hunter**. Pada tahun 2024 WFMH akan mempersembahkan Kampanye Global, bertepatan dengan peringatan 75 tahun organisasi ini. Kampanye ini mengusung tema 'It is Time to Prioritize Mental Health in the Workplace' atau 'Saatnya Memprioritaskan Kesehatan Jiwa di Tempat Kerja'.

Tema ini diambil mengingat betapa signifikan hubungan antara pekerjaan dan kesehatan mental. Dilansir dari WHO Pada tahun 2019, diperkirakan sekitar 15% orang dewasa usia kerja mengalami gangguan mental. Pekerjaan yang layak dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental seseorang, sementara lingkungan kerja yang buruk seperti diskriminasi, ketidaksetaraan, beban kerja yang berlebihan, rendahnya kontrol atas pekerjaan dan ketidakpastian kerja dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan mental.

Tema tahun ini dipilih untuk memperjuangkan hak setiap orang, di mana pun untuk memperoleh akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi yang bermutu, serta air minum yang aman, udara bersih, gizi yang baik, perumahan yang bermutu, kondisi kerja dan lingkungan yang layak, serta kebebasan dari diskriminasi. Kesehatan mental merupakan hak asasi manusia yang mendasar bagi

semua Orang siapa pun dan dimana pun mereka berada, berhak atas standar kesehatan mental setinggi-tingginya yang dapat dicapai. Ini termasuk hak untuk dilindungi dari risiko kesehatan mental, Memiliki kondisi kesehatan mental tidak boleh menjadi alasan untuk merampas hak asasi manusia seseorang atau mengecualikan mereka dari pengambilan keputusan tentang kesehatan mereka sendiri. Namun di seluruh dunia, orang-orang dengan kondisi kesehatan mental terus mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Banyak yang dikecualikan dari kehidupan masyarakat dan didiskriminasi, sementara lebih banyak lagi yang tidak dapat mengakses perawatan kesehatan mental yang mereka butuhkan atau hanya dapat mengakses perawatan yang melanggar hak asasi manusia mereka. Paparan terhadap keadaan sosial, ekonomi, geopolitik, dan lingkungan yang tidak menguntungkan – termasuk kemiskinan, kekerasan, ketidaksetaraan,

dan deprivasi lingkungan – juga meningkatkan risiko seseorang mengalami kondisi kesehatan mental. Risiko dapat muncul di semua tahap

kehidupan, tetapi risiko yang terjadi selama periode perkembangan yang sensitif, terutama pada masa kanak-kanak, sangat merugikan. Misalnya, pola asuh yang kasar dan hukuman fisik diketahui dapat merusak kesehatan anak, sementara perundungan merupakan faktor risiko utama untuk kondisi kesehatan mental. Mempromosikan kesehatan mental anak dan remaja merupakan prioritas lain dan dapat dicapai melalui kebijakan dan undang-undang yang mempromosikan dan melindungi kesehatan mental, mendukung pengasuh untuk memberikan perawatan yang penuh kasih sayang, menerapkan program berbasis sekolah, dan meningkatkan kualitas lingkungan komunitas dan daring. Program

WORLD MENTAL HEALTH DAY 2024

Penulis : CHELSIE MAKAYLA

pembelajaran sosial dan emosional berbasis sekolah merupakan salah satu strategi promosi yang paling efektif bagi negara-negara di semua tingkat pendapatan.. Hal ini harus dilakukan melalui perawatan kesehatan mental berbasis komunitas, yang lebih mudah diakses dan dapat diterima daripada perawatan di lembaga, membantu mencegah pelanggaran hak asasi manusia, dan memberikan hasil pemulihan yang lebih baik bagi orang-orang dengan kondisi kesehatan mental Kesenjangan perawatan yang besar untuk kondisi kesehatan mental umum seperti depresi dan kecemasan berarti negara-negara juga harus menemukan cara inovatif untuk mendiversifikasi dan meningkatkan perawatan untuk kondisi ini, misalnya melalui konseling psikologis non-spesialis atau swadaya digital.

Selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia! Di hari yang spesial ini, mari kita bersama-sama ciptakan dunia yang lebih peduli dan mendukung kesehatan mental, di mana setiap orang merasa aman untuk berbagi dan mencari bantuan



DINAMIKA MALHIKDUWA



Jelang Pelantikan Presiden 2024

Penulis: Ainaya Tasnimatul Izza

Jadwal pelantikan presiden dan wakil presiden 2024

Untuk menjawab pelantikan presiden tanggal berapa, masyarakat bisa melihatnya melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Merujuk pada PKPU tersebut, pelantikan atau pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 2024 dijadwalkan pada **Minggu, 20 Oktober 2024**. Pelantikan ini akan dilakukan di gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada tanggal ini, digelar pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden. Secara resmi jabatan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin digantikan oleh Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka selaku presiden dan wakil presiden RI 2024-2029.

Aturan pelantikan presiden dan wakil presiden 2024 ketentuan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024 tertuang dalam Pasal 50 PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Berikut aturan pelantikan presiden dan wakil presiden 2024:

1. Dalam hal calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden maka Majelis

Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua. 2. Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. 3. Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap sebelum pelantikan, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden. 4. Pasangan Calon terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) meliputi: meninggal dunia; atau tidak diketahui keberadaannya.

Demikian penjelasan mengenai pelantikan presiden tanggal berapa dan aturannya. Maka merujuk pada PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pelantikan atau pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 2024 dijadwalkan pada 20 Oktober 2024

Dalam sejarah pelantikan Presiden RI ada beberapa Presiden RI yang juga dilantik di tanggal yang sama, 20 Oktober. Seperti Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang dilantik pada 20 Oktober 1999, lalu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilantik pada 20 Oktober 2004, dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo

(Indonesia.go.id).

Berikut ini urutan tanggal pelantikan Presiden dalam sejarahnya dari masa ke masa:

Presiden RI ke-1 yaitu Ir. Soekarno dilantik pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dilantik bersama Mohammad Hatta selaku Presiden dan Wakil Presiden RI pertama. Soekarno menjabat sebagai Presiden RI selama 18 Agustus 1945-12 Maret 1967. Sementara Moh. Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden RI selama 18 Agustus 1945-1 Desember 1956.

Presiden RI ke-2 yaitu Soeharto dilantik pada 12 Maret 1967. Selama menjabat sebagai Presiden RI sampai 21 Mei 1998, Soeharto memiliki enam Wakil Presiden, yaitu Hamengkubuwono IX (24/03/1973-23/03/1978), Adam Malik (23/03/1978-11/03/1983), Umar Wirahadikusumah (11/03/1983-11/03/1988), Soedharmono (11/03/1988-11/03/1993), Try Sutrisno (11/03/1993-11/03/1998), dan Bacharuddin Jusuf (B.J.) Habibie (11/03/1998-21/05/1998).

Presiden RI ke-3 yaitu B.J. Habibie dilantik pada 21 Mei 1998. Habibie menjabat sebagai Presiden RI untuk menggantikan Soeharto yang lengser pada tanggal yang sama saat dirinya dilantik. Menjadi Presiden RI selama kurang lebih satu tahun, masa jabatan B.J. Habibie berakhir pada 20 Oktober 1999.

(Jokowi) Presiden RI ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilantik pada 20 Oktober 1999, menggantikan B.J. Habibie. Gus Dur dilantik bersama Megawati Soekarnoputri selaku Presiden dan Wakil Presiden RI keempat. Masa jabatan mereka berakhir pada 23 Juli 2001

Presiden RI ke-5 yaitu Megawati Soekarnoputri dilantik pada 23 Juli 2001, menggantikan Gus Dur. Megawati dilantik bersama Hamzah Haz selaku Presiden dan Wakil Presiden RI kelima. Menjabat selama kurang lebih tiga tahun, pada 20 Oktober 2004 jabatan mereka pun berakhir.

Presiden RI ke-6 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik pada 20 Oktober 2004. Pada periode pertama, Muhammad Jusuf Kalla dilantik selaku Wakil Presiden RI hingga berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2009. Kemudian pada periode kedua, Boediono selaku Wakil Presiden RI dilantik pada 20 Oktober 2009. Masa jabatan SBY berakhir pada 20 Oktober 2014.

Presiden RI ke-7 yaitu Joko Widodo (Jokowi) dilantik pada 20



Oktober 2014. Pada periode pertama, Muhammad Jusuf Kalla dilantik selaku Wakil Presiden RI hingga berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2019. Kemudian pada periode kedua, Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI dilantik pada 20 Oktober 2019. Masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

DINAMIKA MALHIKDUWA



Sumpah pemuda merupakan tonggak utama dalam sejarah gerakan kemerdekaan Indonesia. Lalu, ikrar ini dianggap sebagai roh kristalisasi untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Dan yang dimaksud "Sumpah pemuda" adalah keputusan kongres pemuda ke-2 yang diadakan selama 2 hari, 27-28 Oktober 1928 di Batavia (Jakarta).

Dalam keputusan ini , menegaskan cita-cita akan menjadi "Tanah air Indonesia", "Rakyat Indonesia", dan "Indonesia". Keputusan ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk "asosiasi kebangsaan Indonesia" dan bahwa "di semua surat kabar yang di terbitkan dan dibaca dalam pertemuan asosiasi antar muka".

Nah, Sumpah pemuda juga punya sejarahnya, Pada tanggal 28 Oktober 1928, sebagai tanggal yang dijadikan hari Sumpah pemuda. Sumpah pemuda merupakan bukti otentik bahwa Bangsa Indonesia telah lahir. Rumusan Sumpah pemuda ditulis oleh Moehammad Yamin, pada sebuah kertas. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Soegondo dan kemudian dijelaskan panjang-lebar oleh Moehammad Yamin.

Sumpah pemuda mengadakan 3 pertemuan yang bernama "Kongres pemuda".

Kongres pertama

Pada hari Sabtu, 27 Oktober 1928, dilaksanakan digedung Katholieke Jongenlingen Bond (GOC). Waterlooplein sekarang Lapangan Banteng. Dalam sebutannya, Ketua GN Sugondo Djojopuspito, berharap konferensi ini akan memperkuat semangat persatuan di benak pemuda. Dilanjutkan

dengan penjelasan tentang makna dan Moehammad Yamin, hubungan persatuan dengan pemuda. Menurut Moehammad Yamin, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan.

Kongres kedua

Pada hari Minggu, 28 Oktober 1928, dilaksanakan di gedung Oost-Java Bioscoop, membahas masalah



MENGENANG SEJARAH SUMPAN PEMUDA

Penulis: Zuriathul Azzahra

pendidikan. Kedua pembicaraan Poernomowoelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak-anak harus menerima kewarganegaraan pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak-anak juga perlu dididik secara demokratis.

Kongres ketiga

Dilaksanakan di gedung Indonesische Clubgebouw di jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Sementara ramelan mengemukakan, Gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak dan disiplin diri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Dalam sumpah pemuda, ada 13 tokoh penting yang terlibat:

1. Soegondo Djojopoespito
2. SoenarioSastrowardoyo
3. JohannesLeimena
4. Djoko Marsaid
5. Muhammad Yamin
6. Amir Sjarifoeddin Harahap
7. WR Supratman
8. Sarmidi Mangoensarkor
9. Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo
10. Kasman Singodimedjo
11. Mohammad Roem
12. Adnan Kapau Gani
13. Sie Kong Liang

DINAMIKA MALHIKDUWA



Sugondo Djojopuspito : Ketua Kongres Pemuda tahun 1928
Tokoh penggerak utama kongres Pemuda II.

Sugondo Djojopuspito

Sugondo Djojopuspito (22 Februari 1905 – 23 April 1978) adalah *tokoh pemuda tahun 1928* yang memimpin Kongres Pemuda Indonesia Kedua dan menghasilkan *Sumpah Pemuda*, dengan motto: Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa: Indonesia.

Latar Belakang dan Pendidikan

Sugondo Djojopuspito lahir di Tuban, 22 Februari 1905 bapaknya bernama Kromosardjono adalah seorang Penghulu dan Mantri Juru Tulis Desa di kota Tuban, Jawa Timur. Ketika Soegondo masih kecil, ibunya Soegondo sakit-sakitan dan meninggal dunia, kemudian Bapak Kromosardjono kawin lagi dan pindah ke Brebes Jawa Tengah menjabat sebagai lurah di sana. Selanjutnya Soegondo dan adiknya (Soenarjati) diangkat anak oleh pamannya yang bernama Bapak *Hadisewojo* (seorang *collecteur* wilayah Blora, dan tidak punya anak, dan juga mengangkat *Sudarjati* dari anak saudara sepupu *Keluarga Ny. Brotoamidjojo*, serta *Sumijati* dari anak saudara sepupu *Keluarga S. Soekadji*, sehingga Bapak *Hadisewojo* mempunyai 4 anak angkat yang saling ikatan saudara sepupu).^[4] Pamannya ini yang menyekolahkan Soegondo dari HIS di Tuban hingga RH di Batavia, termasuk adik-adiknya. Peranan Bapak *Hadisewojo* sangat besar dalam membimbing Soegondo sejak dari HIS di Tuban, menitipkan mondok di Cokroaminoto Surabaya, menitipkan mondok di Ki Hadjar Dewantara Yogyakarta, dan hingga mengarahkan masuk ke RH Batavia.

MENGENAL TOKOH SUMPAH PEMUDA

PENULIS : Nafuza Syifa'ul Marwa

Soegondo mengenyam pendidikan HIS (Sekolah Dasar 7 tahun) tahun 1911-1918 di kota Tuban. Tahun

ke Surabaya untuk meneruskan ke MULO (Sekolah Lanjutan Pertama 3 tahun) tahun 1919 - 1922 di Surabaya, oleh pamannya ia dititipkan mondok di rumah HOS Cokroaminoto bersama Soekarno. Kemudian setelah lulus MULO, tahun 1922 melanjutkan sekolah ke AMS afdeling B (Sekolah Menengah Atas bagian B - paspal - 3 tahun) di Yogyakarta tahun 1922-1925, dan oleh pamannya melalui HOS Cokroaminoto dititipkan mondok di rumah Ki Hadjardewantoro di Lempoejangan Stationweg 28 Jogjakarta (dulu Jl. Tanjung, sekarang Jl. Gajah Mada), yaitu sebelah barat Puro Paku Alam.

Setelah lulus AMS tahun 1925 melanjutkan kuliah atas biaya pamannya dan beasiswa di *Rechtshoogeschool te Batavia* (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta - didirikan tahun 1924 - cikal bakal Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekarang). Ia mondok di rumah pegawai pos bersama beberapa pegawai pos Pasar Baru lainnya di Gang Rijkzman (belakang Rijkswijk - sekarang Jl Juanda belakang Hotel Amaris Stasiun Juanda), sehingga ia bisa membaca majalah *Indonesia Merdeka* asuhan Mohammad Hatta terbitan *Perhimpunan Indonesia* di Negeri Belanda yang dilarang masuk ke Indonesia. Selama mahasiswa hidup sulit hanya punya satu baju, yang harus dicuci dulu kalau mau kuliah. Kuliah di RHS hanya mencapai lulus tingkat Kandidat Satu (C1), setelah Propadeus, karena beasiswanya dicabut akibat kegiatan politiknya dan juga pamannya meninggal dunia (sekarang setingkat dengan ijazah D2, karena sistem pendidikan sekolah tinggi pada waktu itu adalah terdiri atas 4 jenjang, yaitu: Propadeus, Kandidat 1 dan Kandidat 2, serta Doktoral).

Perjuangan

Sumpah Pemuda "28 Oktober 1928"

Pada waktu semua orang ikut dalam organisasi pemuda, pemuda Sugondo masuk dalam PPI (Persatuan Pemuda Indonesia - dan tidak masuk dalam Jong Java). Pada tahun 1926 saat Kongres Pemuda I, Sugondo ikut

serta dalam kegiatan tersebut. Tahun 1928, ketika akan ada Kongres Pemuda II 1928, maka Sugondo terpilih jadi Ketua atas persetujuan Drs. Mohammad Hatta sebagai ketua PPI di Negeri Belanda dan Ir. Sukarno (yang pernah serumah di Surabaya) di Bandung. Mengapa Sugondo terpilih menjadi Ketua Kongres, karena ia adalah anggota PPI (Persatuan Pemuda Indonesia - wadah pemuda independen pada waktu itu dan bukan berdasarkan kesukuan).

Tanda Kehormatan Republik Indonesia

Atas jasa pada masa pemuda dalam memimpin *Sumpah Pemuda*, maka oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1978 diberikan Tanda Kehormatan Republik Indonesia: berupa Bintang Jasa Utama. Selain itu, ia juga mendapat Satya Lencana Perintis Kemerdekaan pada tahun 1992.

Keluarga

- **Suwarsih Djojopuspito**, (Lahir Cibatok 1912 - Wafat Yogyakarta 1977), isteri, seorang guru lulusan Europeesche Kweek School Surabaya, adalah seorang wanita Sunda yang menulis novel dalam 3 bahasa (Sunda, Belanda, Indonesia), mendapat Bintang Kehormatan Budaya Parama Dharma pada tgl. 14 Agustus 2013 oleh SBY



- **Sunartini Djanan Chudori, SH** (almarhum, Lahir Bandung 1935 - Wafat Yogyakarta 1996), anak pertama, Sarjana Hukum lulusan UGM, aktivis LBH Yogyakarta

- **Sunarindrati Tjahyono, SH**, (Lahir Yogyakarta 22 Februari 1937, tanggal kelahiran sama dengan bapaknya), anak kedua, Sarjana Hukum lulusan UGM, pensiunan Bank Indonesia, sekarang bekerja sebagai Direktur Bank Mizuho Jakarta
- **Ir. Sunaryo Joyopuspito, M.Eng.**, (Lahir Bandung 1939), anak ketiga, Sarjana Teknik ITB, Sertifikat Urban Transport JICA Tokyo, dan Magister

DINAMIKA MALHIKDUWA



Sejarah Hari Santri

Sejarah Hari Santri Nasional sangat berkaitan erat dengan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Peristiwa bersejarah tersebut membawa bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari para penjajah berkat perjuangan para santri dan campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, KH Hasjim Asy'ari menyerukan resolusi jihad yang dicetuskan oleh pendiri Nahdlatul Ulama. Seruan tersebut dilakukan untuk mencegah dan menghalangi kembalinya tentara Kolonial Belanda yang mengatasnamakan NICA.

Saat itu, KH Hasjim Asy'ari menyerukan jihad dengan mengatakan bahwa "Membela tanah air dari penjajah hukumnya fardlu 'ain atau wajib bagi setiap orang." Seruan ini membakar semangat para santri Surabaya untuk menyerang Markas Bridge 49 Mahratta pimpinan Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sothern Mallaby.

Pada pertempuran tersebut, Jenderal Mallaby tewas dalam pertempuran yang berlangsung tiga hari berturut-turut. Pertempuran itu terjadi pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Jenderal tersebut tewas bersama pasukannya sebanyak +/- 2.000 pasukan. Peristiwa tersebut menyulut kemarahan angkatan perang Inggris, yang akhirnya berujung pada Peristiwa 10 November 1945

Hari Santri Nasional (HSN) diperingati setiap tanggal 22 Oktober setiap tahunnya. Peringatan Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal Jakarta. Hal tersebut berdasarkan Keputusan

Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2015. Penetapan ini dimaksudkan *untuk meneladankan semangat jihad kepada para santri tentang kelIndonesiaan yang digelorakan para ulama.*

Dua puluh dua Oktober dipilih karena bertepatan dengan satu peristiwa bersejarah yakni seruan yang dibacakan oleh Pahlawan Nasional KH Hasjim Asy'ari pada 22 Oktober 1945. Pada tanggal tersebut, KH Hasjim Asy'ari menyerukan perintah kepada umat Islam untuk berperang (jihad) melawan tentara Sekutu yang ingin menjajah kembali wilayah Republik Indonesia pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Sekutu yang dimaksudkan adalah Inggris sebagai pemenang Perang Dunia II untuk mengambil alih tanah jajahan Jepang. Sementara itu, di belakang tentara Inggris terdapat pasukan Belanda yang ikut membonceng. Selain itu, aspek lain yang melatarbelakangi penetapan Hari Santri Nasional adalah adanya pengakuan resmi pemerintah Republik Indonesia atas peran besar umat Islam dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hari Santri Nasional bertujuan untuk memperingati peran besar kaum kiyai dan kaum santri dalam perjuangannya melawan penjajah yang bertepatan dengan seruan KH Hasjim Asy'ari tersebut. Peran ulama-ulama lainnya seperti KH Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah, A. Hassan dari Persis, Ahmad Soorhati dari Al Irsyad, dan Abdul Rahman dari Matlaul Anwar.

Para ulama selalu mengawal kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan,

para ulama tetap mengawal kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kepahlawanan KH Hasyim Asy'ari dengan fatwa jihadnya, pada 14 September 1945.

Resolusi Jihad diputuskan dalam rapat para konsul NU Se-Jawa Madura. Isi dari Resolusi Jihad tersebut diantaranya: (1) kemerdekaan Indonesia wajib dipertahankan, (2) umat Islam, terutama warga NU, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia, (3) kewajiban tersebut adalah "jihad" yang menjadi kewajiban bagi setiap orang Islam dalam jarak radius 94 Km (jarak dimana umat Islam dapat melakukan shalat jama' & qasar). Sementara itu, bagi mereka yang berada di luar jarak tersebut, wajib membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak 94 Km tersebut. Terdapat tambahan dalam teks lainnya, yakni "Kaki tangan musuh adalah pemecah belah kebulatan tekad dan kehendak rakyat dan harus dibinasakan; menurut hukum Islam sabda hadits (Nabi) riwayat Muslim."

Meskipun penetapan Hari Santri Nasional dilatarbelakangi oleh resolusi jihad yang diserukan oleh KH Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, tetapi peringatan ini tidak dimaksudkan untuk kelompok atau golongan tertentu. Peringatan Hari Santri Nasional di Indonesia harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan nasionalisme di kalangan umat Islam yang sudah ada sejak zaman penjajahan dulu.

Peran umat Islam sendiri pada masa penjajahan dapat terlihat dari banyaknya pahlawan yang melandaskan perjuangannya atas dasar agama Islam. Banyak para kiyai atau para pemuka agama Islam dan raja-raja Islam yang turun dan memimpin peperangan melawan para penjajah

Hari Santri Nasional 2024

Menyambung Juang

Merengkuh Masa Depan

Penulis : Muhamad Fakhri Alfian